

**RENCANA STRATEGIS
POLRES METRO JAKARTA SELATAN
TAHUN 2015-2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Pembangunan Nasional Indonesia harus berkesinambungan dan menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia yang demikian, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 telah menetapkan dan merumuskan Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.” Penjabaran dan tafsir dari Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini memasuki tahap III Tahun 2015-2019.

Polri sebagai lembaga pemerintahan di bidang keamanan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra). Tahapan Renstra Polres Metro Jakarta Selatan saat ini memasuki Tahun ke-3 yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan strategis. Tahapan Renstra Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 Perubahan tersebut juga disinkronkan dengan Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019, RPJMN 2015-2019 dan Grand Strategi Polri yang merupakan amanat dari Reformasi Birokrasi Polri (RBP).

Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Tahap I tahun 2005-2009 membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*), Renstra Tahap II tahun 2010-2014 dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat (*Partnership Building*), dan saat ini sedang melaksanakan Renstra Tahap III tahun 2015-2019 dengan mengimplementasikan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (*Strive for Excellence*) dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat serta membangun kerja sama dengan *Stakeholder* terkait di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Jakarta Selatan juga

siap melaksanakan Renstra akan datang yaitu Renstra Tahap IV 2020-2025.

Polres Metro Jakarta Selatan pada pelaksanaan Renstra sebelumnya yaitu Renstra tahap II 2010-2014 berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas, konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang memerlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait, secara umum Polres Metro Jakarta Selatan telah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Renstra Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2010-2014.

Dalam bidang operasional, secara umum situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan di tahun 2017 cenderung stabil dan terkendali. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan agenda nasional yaitu Pilkada Serentak Tahun 2017 yaitu pengamanan operasi Pilkada DKI Jakarta tahap I dan II serta melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat maupun operasi kewilayahan. Dalam mengungkap kasus-kasus menonjol yang mendapat perhatian masyarakat antara lain : pengungkapan kasus penganiayaan anggota Koprs Brimob Polri AKP Dede Suhatmi dan Briptu M Syaiful Bakhtiar di Masjid Faletahan Kebayoran Baru dengan tersangka Mulyadi, pengungkapan kasus pemasangan bendera ISIS di Polsek Kebayoran Lama dengan tersangka berinisial GOH, pengungkapan penyalahgunaan UU psikotropika di Komplek Bali Pisangan Ciputat Timur dengan tersangka Taura denang Sudiro (Tora Sudiro) dan pengungkapan penyalahgunaan narkoba di kompleks Griya Kecapi Jagakarsa dengan tersangka Diedo Maradona Tampubolon alias Ello.

Di bidang pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah yang terkait dengan pelayanan bidang penerbitan SKCK, Polres Metro Jakarta Selatan telah membuat inovasi pelayanan SKCK on line dan Laporan brantas Narkoba berbasis IT (Qlue) dan telah diterima masyarakat di wilayah Jakarta Selatan .

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral, modern dan patuh hukum dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya manusia Polri yang memadai dari segi kualitas maka Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan kerja sama dengan kampus untuk pelatihan Komputer bagi Brigadir Polisi serta guna memupuk keimanan anggota Polri dan PNS dengan diadakan pengajian setiap bulan satu kali bagi yang muslim di Masjid Nur Abu Wizar dan umat Kristiani melaksanakan ibadah pada setiap hari Jumat di aula Lantai 4 Polres Metro Jakarta Selatan.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tahun 2016 Polri memperoleh nilai 72,28 dari Kementerian PANRB, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) memperoleh penilaian “hijau” dari UKP4. Polri juga telah memperoleh penilaian WTP tanpa paragraf dari BPK dalam pertanggungjawaban keuangannya. Untuk Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Polri memperoleh penilaian klasifikasi BB (70,02) dari Kementerian PANRB.

Pencapaian keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel Polri serta dukungan yang besar dari pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat. Meskipun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mengharapkan kinerja Polri terus lebih baik.

Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah bijak Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan kriminalitas yang profesional, bermoral dan modern serta menjunjung tinggi HAM, Polres Metro Jakarta Selatan telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana, antara lain dengan mengusulkan pengadaan peralatan transportasi, mesin maupun IT dan mengusulkan pengadaan Lift gedung Polres Metro Jakarta Selatan serta mengusulkan pembangunan sarana prasarana gedung Polsek Kebayoran Lama dan Rumah Dinas Flat di Ulu Jami, dalam mengoptimalkan Sarpras yang ada dengan cara pemeliharaan guna memperpanjang usia pakai.

Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut, sepanjang Tahun 2017 Polres Metro Jakarta Selatan ternyata masih menemui beberapa tantangan. Di bidang operasional, permasalahan yang masih marak yaitu tawuran antar warga, kejahatan jalanan/premanisme dan penyalahgunaan Narkoba yang memerlukan penanganan khusus dan berkesinambungan, dan lain sebagainya, permasalahan transportasi yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas khususnya di wilayah Jakarta Selatan merupakan pemandangan sehari-hari karena kapasitas jalan sudah tidak memadai dengan jumlah kendaraan bermotor.

Di bidang anggaran Polres Metro Jakarta Selatan, terjadi kenaikan. Pada tahun 2016 alokasi anggaran Polres Metro Jakarta Selatan sebesar Rp. 136.105.634.000,-. Kemudian, hingga 2017, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp. 158.859.462.000,-. Namun anggaran Polres Metro Jakarta Selatan masih didominasi oleh Belanja Pegawai (76,93%). Sedangkan Belanja Barang (23,04%) dan Belanja Modal (0,02%) yang diperlukan untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan tupoksi justru masih sangat terbatas. Postur anggaran Polres Metro Jakarta Selatan sampai dengan tahun 2017 masih sangat jauh dari postur ideal yang diharapkan, namun demikian Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.

Permasalahan lain yang dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan di bidang organisasi antara lain belum adanya kesesuaian Tipologi Polsek pada Polsek Kebayoran Lama dan Polsek Cilandak dengan karakteristik daerah. Permasalahan di bidang SDM Polri seperti kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi dan secara kuantitas belum terpenuhinya personel sesuai dengan DSP, sedangkan permasalahan di bidang sarana dan prasarana Polda Metro Jaya masih menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: fasilitas Polri yang belum dibangun seperti gedung Polsek Kebayoran Lama, Mampang dan Tebet serta pembangunan flat Rumdin Ulujami; masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; serta banyak peralatan Polri yang kurang memadai sehingga sarana mobilitas operasional dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik tidak optimal.

Dalam menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks dan mengarah pada *Transnational Crime* (kartel, *Bioterrorism*, *Narcoterrorism*, *Cyber Crime*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi Kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi Tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polda Metro Jaya yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan yang menimbulkan potensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan Kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan Kamtibmas.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan yang Bersifat Multidimensi

1) Global

- a) Pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai 7,2 miliar jiwa dan perubahan iklim menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan serta munculnya efek

pemanasan global yang meningkatkan suhu permukaan bumi dan menimbulkan berbagai ragam penyakit serta gangguan kesehatan di seluruh dunia.

- b) ketatnya persaingan global membuat perubahan besar pada pola hubungan antarnegara dengan terbentuknya tatanan baru yang saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi kerja sama antarnegara baik di tingkat internasional maupun regional, seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, NAFTA, *World Trade Organization*, *World Bank*, *International Monetary Fund* dan *The Mercosur-European Union Business Forum*;
- c) dalam pandangan Amerika Serikat dan Eropa Barat tentang fundamentalisme agama senantiasa dikaitkan dengan isu-isu terorisme internasional;
- d) fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal, meningkatnya konsumsi BBM, penurunan cadangan minyak bumi, serta aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;
- e) konflik yang timbul di wilayah timur tengah dimana beberapa negara arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang dianggap memberikan dukungan terhadap berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah termasuk Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda dan kelompok-kelompok militan Islam yang didukung oleh Iran;
- f) konflik bersenjata di Suriah antara pasukan militer Presiden Bashar Al-Asad dan kelompok oposisi, rentan terhadap upaya politisasi agama sehingga dapat memicu mobilisasi WNI untuk mengikuti latihan bersama (*tanjim*) gerakan radikal di kamp-kamp militer Irak. Berkembangnya ideologi *Islamic State in Irak and Syiria* (ISIS) telah merebak hingga menjangkau berbagai wilayah Indonesia;

2) Regional

Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, di samping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antarnegara dalam satu kawasan. Isu-isu strategis dan negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan Strategis (Lingstra) di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) hubungan

- a) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali mengalami pasang surut karena orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang berkuasa. Sebagai anggota *Five Power Defence Arrangements* (FPDA), Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran, antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia;
- b) isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative* (WPPRO);
- c) dalam lingkungan regional Asia Tenggara keberhasilan integrasi ASEAN dapat memainkan peran sentral dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Secara institusional, ASEAN membentuk AICHR (komisi HAM ASEAN), ACWC (komisi HAM untuk perempuan dan anak), KEA (Komunitas Ekonomi ASEAN) dan berbagai instrumen baru yang mempertegas pola-pola hubungan antar negara anggota ASEAN. Salah satu yang penting dalam ASEAN adalah mobilitas yang terbuka bagi warganegara anggota ASEAN ke negara ASEAN lainnya menimbulkan perubahan yang baik, namun disisi lain dapat pula menimbulkan kerawanan Kamtibmas;
- d) di bidang hukum, ASEAN membuat kesepakatan bersama dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) ASEAN, khususnya untuk memerangi *illegal logging*, *illegal fishing*, korupsi dan berbagai persoalan kejahatan lintas negara. Indonesia telah mengadopsi MLA ASEAN ini dengan UU Nomor 15 Tahun 2008, namun pemanfaatannya belum optimal, antara lain: (1) Narkoba, di sepanjang perbatasan Thailand, Laos dan Burma, dari Kamboja menuju Thailand dan Vietnam untuk kemudian diselundupkan ke luar negeri; (2) Perkembangan politik dalam negeri Thailand mempengaruhi politik dan perdagangan di kawasan ASEAN; (3) Pemerintah Filipina masih menghadapi masalah pemberontakan di Filipina Selatan yang dilakukan oleh Moro Islamic Liberation Front, Misuari Break Awcro Group, ISIS kelompok Abdullah Maute di Marawi, dan Kelompok Abu Sayyaf;

(4) Masalah perbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau-Singapura dan proyek reklamasi wilayah timur Changi; (5) TKI untuk kawasan ASEAN seperti Malaysia, Brunei dan Singapura menimbulkan berbagai persoalan buruh migran; (6) Sengketa Blok Ambalat, Malaysia berulang kali melakukan pelanggaran batas wilayah Republik Indonesia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

3) Nasional

- a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana *euforia*, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b) berkaitan dengan agenda penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 maupun Pemilukada serentak pada tahun 2018, Polri dituntut untuk siap dalam memberikan keamanan terhadap berlangsungnya proses Pemilu yang jujur dan adil;
- c) penerapan kebijakan otonomi daerah masih menimbulkan permasalahan dalam pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Provinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan, atau malah bertentangan dengan Renstra Pemerintah Provinsi sehingga berpengaruh pada pembangunan suatu daerah. Residu dari kebijakan politik tersebut berdampak pada situasi keamanan daerah dan akan menjadi beban tugas Polri. Beban tugas Polri tersebut akan bertambah dengan pemekaran wilayah di berbagai daerah yang sarat permasalahan konflik antar kelompok kepentingan hingga menimbulkan korban harta dan jiwa di tengah masyarakat.
- d) dampak dari krisis finansial global dan stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen pasar modal, nilai tukar rupiah dan investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan global dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, minimnya investasi dan terbatasnya daya serap tenaga kerja. Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya

pendapatan perkapita nasional;

- e) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian, pada sisi lain, keanekaragaman tersebut sering dipertentangkan dan menimbulkan konflik yang dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa;
- f) pesatnya perkembangan globalisasi mempengaruhi budaya dan gaya hidup yang berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat tidak mengindahkan hukum dan norma-norma adat istiadat setempat sehingga dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- g) lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerjasama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Disamping itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran narkoba dan terorisme sulit untuk diatasi.

4) Wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan

- a) Geografi
 - (1) Dari segi geografis, wilayah administrasi Jakarta Selatan merupakan daerah pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi sehingga dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama. Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga yang menjalankan aktifitas sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya *quick response* atau mobilitas tinggi yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai;

(2) Daerah

- (2) Daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah wilayah administrasi kota Jakarta Selatan yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 65 kelurahan dengan luas wilayah adalah 15,184 H;
- (3) Kondisi masyarakat heterogen baik dari segi sosial budaya, sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang merata, merupakan potensi timbulnya kerawanan/konflik antar kelompok dan kepentingan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Dalam persaingan antar kelompok mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan;
- (4) Letak geografi Jakarta yang strategis sebagai pintu masuk berbagai hal dari luar negeri sehingga sebagai etalase bagi masyarakat internasional dalam memandang Indonesia. Berbagai permasalahan keamanan muncul seperti keimigrasian dan penyelundupan orang, barang dan Narkoba.

b) Demografi

- (1) Sebagai pusat pemerintahan, dan Ibukota Negara maka Kota Jakarta menjadi sasaran, dan tujuan kedatangan masyarakat dari seluruh Indonesia dengan berbagai harapan, sehingga berbagai suku dari seluruh Indonesia terdapat di kota Jakarta, sedangkan Warga Betawi sebagai penduduk asli sudah mulai tergusur keberadaannya. Di samping penduduk Indonesia asli, di Jakarta tidak sulit untuk menemukan warga negara asing dari berbagai negara di dunia, hal tersebut tidak terlepas dari posisi kota Jakarta sebagai Ibukota Negara dan pintu gerbang Indonesia;
- (2) Dengan jumlah penduduk yang besar di samping sebagai modal dasar pembangunan juga mengandung kerawanan dengan dimensi kerawanan yang luas dan kompleks. Hal tersebut disebabkan masih belum berimbangnya laju penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia dan sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta.

c) Sumber

c) Sumber Daya Alam

- (1) sumber air di wilayah Jakarta berasal dari Bogor yang mengalir ke Jakarta melalui sungai Ciliwung, dan anak sungai Ciliwung. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum setelah dilakukan penjernihan oleh PDAM yang saat ini dikelola oleh dua perusahaan dari Perancis dan Inggris;
- (2) aliran air dari Bogor disamping sebagai bahan baku air minum warga Jakarta Selatan juga menjadi salah satu penyumbang banjir di Jakarta Selatan. Banjir di Jakarta Selatan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pola hidup warga masyarakat Jakarta Selatan yang membuang sampah sembarangan, sistem drainase yang kurang baik dan penyempitan alur sungai;
- (3) Di wilayah Pesanggrahan terdapat perkebunan pisang, pepaya, rambutan dan lain-lain yang dimiliki perorangan. Hasil panen buah tersebut sebagian dijual untuk menambah penghasilan;
- (4) Perikanan yang dikelola oleh Departemen Perikanan di wilayah Jagakarsa jenis ikan yang dipelihara adalah ikan lele, ikan mas dan ikan gurame;
- (5) Peternakan di wilayah Jakarta Selatan tepatnya di kecamatan Jagakarsa dan kecamatan Pancoran banyak dipelihara kambing , sapi dan ayam potong kebanyakan untuk dijual serta diambil susunya.

d) Ideologi

Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia diterima oleh bangsa Indonesia, sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, perlu adanya penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Warga Ibukota khususnya Jakarta Selatan guna menghadapi keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah Pancasila dergan Ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis.

e) Politik

e) Politik

- (1) Adanya dengan agenda penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 Polres Metro Jakarta Selatan dituntut untuk siap dalam memberikan keamanan terhadap berlangsungnya proses Pemilu yang jujur dan adil;
- (2) penerapan kebijakan otonomi daerah masih menimbulkan permasalahan. Residu dari kebijakan politik tersebut berdampak pada kegiatan Unras di Jakarta Selatan dan akan menjadi beban tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

f) Ekonomi.

- (1) dampak krisis keuangan global dan fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap aspek-aspek sebagai berikut: menurunnya transaksi perdagangan dan kegiatan investasi; turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan akibat semakin terbatasnya peluang kerja dan sumber-sumber ekonomi masyarakat; meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat;
- (2) perekonomian pada tahun 2015-2019 diperkirakan masih dalam kondisi yang sulit, terutama jika dikaitkan dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2014 dan dampak krisis finansial global. Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen pasar modal, nilai tukar rupiah dan investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan global dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya pendapatan perkapita nasional;
- (3) pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan dihadapkan pula pada ancaman krisis pangan akibat berbagai faktor baik domestik maupun global serta perubahan iklim (*climate change*) yang mempengaruhi rotasi

waktu panen, kemarau panjang dan bencana alam yang dapat berdampak pada kegagalan panen.

g) Sosial Budaya

- (1) Wilayah Jakarta Selatan sebagai tempat sentra ekonomi dan perkantoran serta merupakan daerah pemukiman sering terjadi berbagai masalah sosial antara lain : pemukiman yang tidak memenuhi kesehatan, banyak lingkungan yang kumuh, banyaknya pendatang sebagai tenaga kerja yang ketrampilannya kurang memadai, dan kesemrawutan lalu lintas.
- (1) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki warga wilayah Jakarta Selatan turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi untuk membangun bangsa, di sisi lain, keanekaragaman tersebut sering dipertentangkan dan menimbulkan konflik yang dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa;
- (2) pesatnya perkembangan globalisasi mempengaruhi budaya dan gaya hidup yang berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat tidak mengindahkan hukum dan norma-norma adat istiadat setempat sehingga dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- (3) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antarpemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama. Pada sisi lain, konflik klaim kebenaran antar penganut aliran agama bahkan memunculkan fanatisme sempit yang dapat merusak tatanan "Bhinneka Tunggal Ika" dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

h) Keamanan

h) Keamanan

- (1) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas antara lain; premanisme, pencurian dengan kekerasan (*street crime*), terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, narkoba, perdagangan manusia, serta kejahatan ekonomi lintas negara;
- (2) perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran narkoba dan terorisme sulit untuk diatasi;
- (3) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrem di Filipina, seperti Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Sementara itu, kelompok JI khususnya dari elemen eks Afghanistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Berkembangnya ideologi Islamic State in Irak and Syria (ISIS) telah merebak di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak kepada ancaman terhadap keutuhan NKRI. Gerakan ini semakin jelas dengan adanya dukungan dari beberapa organisasi sayap ISIS, diantaranya; Kongres Umat Islam Bekasi (KUIB), Jama'ah Mimbar Tauhid wal Jihad (MTJ), Forum Aktivistis Syari'at Islam (FAKSI) dan Umat Islam Nusantara (UIN).

b. **SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)**

Analisa SWOT dapat dilakukan atas faktor-faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1) **Kekuatan**

1) Kekuatan

- a) Personel Polres Metro Jakarta Selatan sebanyak 1.688 orang terdiri dari Polri 1.627 orang dengan kepangkatan Pamen 62 orang, Pama 212 orang, Bintara dan Tamtama 1.353 orang. Sedangkan PNS 61 orang terdiri dari Gol. IV 1 orang, Gol. III 22 orang, Gol. II/I 39 orang;
- b) Gelar kekuatan dan lapis kemampuan Polres Metro Jakarta Selatan telah tergelar mulai tingkat pusat sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut menggambarkan postur kekuatan Polri yaitu Mabes Polri sebagai penanggung jawab keamanan, Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan masyarakat;
- c) Polres Metro Jakarta Selatan membawahi 10 Polsek dan 31 Polsubsektor. Pada tingkat kabupaten/kota dikendalikan oleh Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD), Sedangkan di tingkat kecamatan dikendalikan oleh Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian. Pada tingkat kecamatan pengendalian di wilayah tertentu Polsek dibantu oleh Polsubsektor dan pada desa/kelurahan ditempatkan Bhabinkamtibmas atau anggota Polri perorangan bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan Kamtibmas;
- d) dukungan sarana dan prasarana Polres Metro Jakarta Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya peralatan operasional seperti alat transportasi darat (kendaraan bermotor patroli, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil tergelar, mulai dari Polres sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;
- a) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;

b) kemampuan

- b) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crimes* (terorisme, narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging, illegal mining*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

2) Kelemahan

- a) berdasarkan laporan kekuatan personel Polres Metro Jakarta Selatan semester 1 akhir Tahun 2017 ratio perbandingan antara Polri dan penduduk (1: 591) belum ideal bila dilihat secara riil dari sejumlah 446.477 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung). Namun pada sisi lain, besarnya personel Polri berdampak pada anggaran belanja pegawai yang besar pula dibandingkan dengan anggaran belanja modal dan barang guna kegiatan operasional kepolisian. Oleh karena itu, perlu dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai guna menunjang rasio Polri Polres Metro Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b) pemenuhan anggaran ideal Polres Metro Jakarta Selatan yang tidak tercapai berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Polri. Sehingga alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas tertentu, misalnya untuk belanja pegawai guna tetap berjalannya roda organisasi. Sementara belanja modal dan barang guna kegiatan operasional kepolisian, tidak sepenuhnya terpenuhi sehingga pelayanan dan penegakan hukum tidak optimal, terutama dalam menghadirkan Polisi setiap saat sebagai simbol negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warganya;
- c) keterampilan dan kemampuan personel Polres Metro Jakarta Selatan di lapangan belum merata, terutama dari segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi informatika dan biokimia di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih;

d) masih

- d) masih terbatas penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang berlatar belakang pendidikan SI (Strata Satu) atau yang setara, berdampak pada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini semakin lemah dengan minimnya anggaran penyidikan, khususnya untuk kasus-kasus berat seperti Korupsi;
- e) konsep dan falsafah Polmas belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan, baik dalam kebijakan maupun regulasi kewenangan oleh sebagian personel Polri, khususnya personel Polri, sebagai kemampuan dasar;
- f) belum optimalnya perangkat lunak maupun keras database Polri yang terintegrasi antar KOD. Jika telah terbangun, akan sangat menunjang komunikasi dan perwujudan pelayanan Polri yang proaktif dan terintegrasi;
- g) belum memadainya kesejahteraan personel Polri untuk mendukung kinerja Polri, terutama dalam hal perumahan, markas komando dan sarana prasarana mobilitas.

3) Peluang

- a) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;
- b) tugas operasional Polri dalam menciptakan keamanan dalam negeri melalui penggelaran Bhabinkamtibmas dengan menerapkan strategi Polmas semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*);
- c) meningkatnya intensitas hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership*) baik dalam negeri maupun luar negeri guna mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;

d) kebijakan

- d) kebijakan pemerintah tentang penerimaan personel dengan pendekatan *Minimal Zero Growth* untuk mengimbangi proporsional anggaran Polres Metro Jakarta Selatan (belanja pegawai 76,93%, belanja barang 23,04% dan belanja modal 0,02%).

4) Ancaman

- a) trend peningkatan empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polres Metro Jakarta Selatan untuk meningkatkan kinerja di bidang pencegahan dan penegakan hukum;
- b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di samping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam mengembangkan modus kejahatan;
- c) tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri;
- d) sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam penerapan penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan;
- e) aplikasi media sosial sangat akrab dengan warga Ibukota, namun masih banyak informasi-informasi yang salah atau tidak benar (*Hoax*) yang beredar memungkinkan menimbulkan suatu permasalahan/perpecahan di masyarakat.

c. Kendala

- 1) pertentangan kebijakan politik dengan penegakan hukum dapat menimbulkan intervensi pada setiap kebijakan Polri sehingga kurang mencerminkan kemandirian Polri dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) adanya wacana mengembalikan struktur kelembagaan Polri di bawah kementerian/lembaga negara mempengaruhi kemandirian Polri dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

3) anggaran

- 3) anggaran Polri masih terpusat pada persentase anggaran dari APBN. Padahal pada Polres Metro Jakarta Selatan mempunyai tugas dan fungsi penanganan ancaman yang tidak bisa diprediksi;
- 4) selama ini hubungan *partnership* Polri masih berkuat pada pembangunan kelembagaan serta penyusunan regulasi (Spindep). Namun dalam tataran praktek, mitra (*partnership*) Polri masih lemah, terutama dalam penguatan kelembagaan dengan instansi lainnya;
- 5) tingkat kepuasan publik (*public trust*) terhadap kinerja Polri fluktuatif dan rentan terhadap pengaruh gejolak politik yang sarat kepentingan.

d. Permasalahan

Menghadapi tantangan sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis baik wilayah Jakarta, Nasional, regional maupun global penanganannya memerlukan profesionalisme Polri, dan pada tahun mendatang tidaklah semakin ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan. Di samping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan dalam negeri, sehingga perlu langkah-langkah konkret Polres Metro Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pelayanan Kamtibmas prima melalui lembaga yang solid dan efektif. Secara umum, permasalahan yang diperkirakan dijumpai, yaitu:

- 1) perlunya optimalisasi pengelolaan keamanan dan penciptaan rasa aman Warga wilayah Jakarta Selatan, baik melalui kegiatan pembinaan maupun operasional.
- 2) perlunya optimalisasi profesionalisme personel Polri melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dan penyesuaian kesejahteraan.
- 3) belum optimalnya kapabilitas Polwan dalam pengarusutamaan gender khususnya dalam penanganan tindak pidana yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) perlunya optimalisasi penanganan tindak pidana yang berimplikasi serius mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti korupsi, Narkoba dan terorisme.

5) masih

- 5) masih adanya permasalahan sosial yang dapat memicu timbulnya konflik sosial yang ditandai dengan masif-nya intoleransi, penyebaran paham radikalisme, separatisme dan diseminasi berita *Hoax* dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berdampak pada terganggunya situasi Kamtibmas perlu mendapat perhatian serius.
- 6) belum optimalnya penggelaran peralatan Polri yang berbasis teknologi dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan secara efektif dan efisien.
- 7) Pemilukada serentak dan Pilpres Tahun 2019 yang berdampak terhadap dinamika politik dan keamanan memerlukan perhatian khusus Polres Metro Jakarta Selatan.

BAB II

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi, Misi dan Tujuan dalam Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 selaras dan harmonis dengan Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 mengacu kepada Pembangunan Nasional Indonesia yang berkesinambungan dan menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai visi “Indonesia yang mandiri, Maju, Adil dan Makmur” yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dengan Sasaran Strategis disesuaikan target Indikator Kinerja yang akan dijalankan dan dicapai oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Visi.

“Terwujudnya Polres Metro Jakarta Selatan yang Profesional, Modern dan Terpercaya”

2. Misi.

- a. mewujudkan postur Polres Metro Jakarta Selatan yang ideal, efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Metro Jakarta Selatan melalui pendidikan dan latihan;
- c. meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- d. meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- e. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f. meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polres Metro Jakarta Selatan yang profesional dan akuntabel.

3. Tujuan

- a. terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN;
- c. terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian.

4. Sasaran

4. Sasaran Strategis

Sesuai dengan tahapan *Grand Strategy* Polri tahap III yang mendasari pencapaian pelayanan publik yang unggul (*strive for excellence*). Sasaran strategis Polres Metro Jakarta Selatan untuk tahun 2015-2019 adalah:

- a. terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta selatan;
- b. tergelarnya Bhabinkamtibmas di kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat;
- c. meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- d. meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana;
- e. meningkatnya pelayanan publik kepolisian;
- f. terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern;
- g. terbangunnya Postur Polri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya;
- h. tergelarnya kekuatan Polri di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan

5. Pentahapan Kebijakan.

- a. Tahun 2015

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

- b. Tahun 2016

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

- c. Tahun 2017

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

- d. Tahun

d. Tahun 2018

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas; dan

e. Tahun 2019

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

BAB III

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3 bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di semua bidang dengan menekankan pencapaian daya saing ekonomi atas dasar daya saing sumber daya alam dan kualitas SDM dan dengan kemampuan yang meningkat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

a. Prioritas Nasional 2015-2019

Dalam RPJMN tahap ke-3 ini, pemerintah telah merumuskan prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari 9 (sembilan) Prioritas Nasional yang disebut dengan NAWACITA dan menjadi landasan pembangunan nasional oleh seluruh Kementerian/Lembaga pada periode 2015-2019 yaitu :

- 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
- 2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
- 4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8) melakukan

- 8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Prioritas Bidang Pertahanan dan Keamanan 2015-2019

Sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, pada RPJMN tahap III juga memperhatikan visi kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan misi khusus pada bidang pertahanan dan keamanan adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yang selaras yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan, maupun peluang yang dihadapi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka sasaran bidang yang akan dicapai adalah :

- 1) terpenuhinya Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan memasuki MEF tahap II;
- 2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit;
- 3) meningkatnya profesionalisme Polri;
- 4) menguatnya intelijen dan kontra intelijen;
- 5) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan;
- 6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba; dan
- 7) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Subbidang Keamanan

Berdasarkan atas prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional pada sub bidang keamanan sebagai berikut:

- 1) terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, dilakukan antara lain melalui :

a) meningkatkan

- a) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan (Harwat). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan Almatsus Polri sehingga Polri dapat menghemat pengeluaran belanja barang;
 - b) melanjutkan pemenuhan Almatsus Polri guna mengimbangi tingkat gangguan keamanan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan strategis sehingga perlu upaya pemenuhan Almatsus Polri sesuai dengan kebutuhan yang lebih komprehensif dan modern;
 - c) meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi Alut Polri sebagai wujud kemandirian keamanan. Sebagaimana diketahui, kebutuhan minimum Alut Polri masih bersumber dari industri luar negeri. Hal ini karena terbatasnya kemampuan industri keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi Alut Polri. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme Polri
- a) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Polri sebagai alat negara di bidang keamanan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM personel. Penguatan SDM anggota sebagai modal komunikasi membangun kemitraan Polri dengan masyarakat. Rendahnya kualitas SDM akan berdampak buruk pada kinerja dan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - b) peningkatan kesejahteraan personel Polri melalui tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu dan tunjangan perbatasan. Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang diberikan atas dasar subjektivitas tempat dan tingkat kemahalan dimana personel Polri bertugas. Sedangkan tunjangan perbatasan adalah tunjangan yang diperuntukkan bagi personel Polri yang bertugas di pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan Indonesia;
 - c) peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mempermudah proses pergerakan dan mobilisasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian. Peningkatan sarana dan prasarana ini termasuk perumahan dinas atau asrama;
 - d) pemantapan

- d) pemantapan manajemen internal Polri melalui akselerasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP). RBP meliputi aspek struktural (organisasi, susunan, kedudukan dan sistem dalam ketatanegaraan), aspek instrumental (Visi, Misi dan tujuan, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan lptek), maupun aspek kultural dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, yang meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, pendidikan, material fasilitas dan jasa, anggaran dan sistem operasional.
- 3) menguatnya Intelijen dan kontra Intelijen, dilakukan antara lain melalui: Pemantapan efektivitas operasi Intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen.
 - 4) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, dilakukan antara lain melalui :
 - a) meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan. Kebijakan ini merupakan bagian dari visi kemaritiman pemerintah. Peningkatan pengawasan penjagaan serta penegakan hukum di laut dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan potensi laut yang dimiliki Indonesia. Karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia serta pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut;
 - b) meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi kepolisian di bidang keamanan laut dan daerah perbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peralatan keamanan laut yang sesuai kebutuhan, komprehensif dan modern;
 - c) meningkatkan sinergi antarlembaga pengamanan laut dan daerah perbatasan. Sebagaimana diketahui ada 13 Kementerian/ Lembaga (K/L) penegak hukum di laut dan daerah perbatasan dengan kewenangan berbeda-beda, namun belum ada sinergi antar Kementerian/Lembaga tersebut sehingga pengoperasiannya masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada koordinasi antarkelembagaan.

5) Menguatnya

- 5) Menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba, dilakukan antara lain melalui :
- a) mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya Narkoba (*Demand Side*). Bahaya penyalahgunaan Narkoba menjadi ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Tingginya tingkat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 juta orang dari total penduduk pada tahun 2011 sangat mengkhawatirkan. Hal ini perlu langkah-langkah strategis berupa sosialisasi secara intensif terkait bahaya Narkoba;
 - b) meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (*Supply Side*). Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba kini semakin berkembang pesat. Peredaran Narkoba kini bersifat transnasional, memanfaatkan kemajuan teknologi tinggi dan dalam beberapa kasus digunakan sebagai sumber pendanaan jaringan terorisme. Karena itu, diperlukan optimalisasi tugas kepolisian dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 2) Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Keamanan
- Berdasarkan atas prioritas pembangunan bidang keamanan dan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang keamanan, maka strategi kebijakan bidang keamanan adalah :
- 1) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan adalah :
 - a) Pengadaan Alpalkam/Almatsus Polri dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Saat ini Almatsus Polri, khususnya di wilayah perairan, meliputi Alat Apung Polsek Sungai, Alat Apung Polsek Pantai dan Kapal Angkut Personel. Secara bertahap, Polri akan terus mengembangkan standar minimal kebutuhan Almatsus Polri yang lebih komprehensif dan modern sesuai tingkat perkembangan kejahatan berteknologi tinggi;
 - b) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasa antarlembaga Litbang-pemerintah-perguruan tinggi-industri dalam rangka membangun industri pertahanan. Untuk itu, diperlukan kebijakan mendorong kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan usaha di sektor industri pertahanan. Selain itu, perlu memberikan ruang kepada anggota untuk melakukan studi, penelitian dan pelatihan berbasis industri pertahanan (industri strategis) baik

dalam.

dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menyiapkan SDM guna mendukung terwujudnya pembangunan industri pertahanan.

2) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri adalah :

- a) perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan dan latihan personel Polri menuju Civil Police. Istilah "*Civil*" mengandung makna/pengertian nonmiliter (*Civilian*), kewargaan (*Civic*) dan keadaban (*Civility*). Istilah ini digunakan PBB. Dalam perkembangannya, *Civil Police* menerapkan "pemolisian demokratis" (*Democratic Policing*), yaitu pemolisian yang berlangsung dan dilaksanakan di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta dijalankan dengan menghormati hak-hak sipil masyarakat;
- b) peningkatan kapasitas Diklat Polri baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat meningkatkan profesionalisme anggota Polri sebagai personel keamanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat;
- c) mempertahankan postur personel Polri penambahan anggota Polri mengutamakan putra daerah (prinsip *Local Boy for Local Job*). Rekrutmen anggota Polri menjangkau calon-calon yang berkualitas, baik secara kesamaptaaan jasmani, moral kepribadian, maupun intelektual, melalui proses *Werving* yang dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel;
- d) peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan Sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personel Polri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian;
- e) peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan Polri sebagai upaya meningkatkan kinerja;
- f) peningkatan pelaksanaan Quick Wins dan Quick Response Polri sebagai langkah pelayanan cepat Polri kepada masyarakat. Quick Wins adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2015-2019;
- g) pengembangan kemampuan Polri dalam rangka kerjasama Internasional Kepolisian melalui koordinasi penegakan hukum, seiring dengan arus deras globalisasi dan modernisasi yang membawa konsekuensi pada perkembangan

- kejahatan transnasional;
- h) pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri yang komprehensif sesuai kebutuhan dan berbasis teknologi;
 - i) peningkatan kemampuan penanganan *Flash Point* dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen dalam rangka deteksi dini atau cegah dini terhadap ancaman yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas;
 - j) penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan Pemilu serentak dan Pemilu 2019. Kebijakan ini merupakan tugas panjang Polri dalam mengamankan tahapan Pemilu, baik Legislatif maupun Pemilu dan Presiden pada tahun 2019;
 - k) meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Polri sesuai dengan perkembangan jaman yang mengarah kepada kehidupan berbasis teknologi;
 - l) pemantapan pelaksanaan *Community Policing* atau Polmas yang bukan sekadar menjadi filosofi yang harus melekat dalam diri setiap polisi tetapi juga diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian; dan
 - m) memantapkan sistem manajemen kinerja Mabes Polri-Polda Polres-Polsek sehingga stabilitas keamanan nasional dapat tercapai guna mendorong pembangunan nasional berjalan maksimal. Selain itu, pemantapan sistem manajemen kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsek adalah peran Polri sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran strategis menguatnya Intelijen dan Kontra Intelijen adalah : Peningkatan profesionalisme SDM, infrastruktur dan modernisasi peralatan seiring dengan perkembangan kejahatan berteknologi tinggi dan bersifat transnasional, sehingga harus didukung oleh SDM yang kompeten serta peralatan yang modern.
- 4) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan adalah:
- a) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan termasuk peningkatan kapasitas

- peralatan *Surveillance* (pengintaian) keamanan laut dalam rangka optimalisasi peran kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perairan;
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk area poros maritim dan tol laut;
 - c) Pengembangan kemampuan Polri di bidang kemaritiman baik melalui pendidikan dan pelatihan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 5) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah:
- a) Optimalisasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah dengan menjalin kemitraan polisi dan masyarakat sehingga upaya ini dapat terlaksana secara maksimal;
 - b) Penyebarluasan informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media, baik media cetak atau elektronik secara terus-menerus;
 - c) Penegakan hukum kejahatan Narkoba, guna pengungkapan jaringan sindikat Narkoba.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya.

- a. Sasaran Strategis “Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat;
 - b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
 - c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.
 - 2) Pemantapan fungsi pencegahan terhadap 4 jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi melalui Strategi adalah meningkatkan kegiatan

Pre-emptif dan *Preventif* dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir gangguan Kamtibmas.

b. Sasaran Strategis “Tergelarnya Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Gejala Sosial Masyarakat” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
 - b) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
 - c) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan *Pre-emptif* dan *Preventif*;
 - d) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan public;
 - e) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas;
 - f) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara; dan
 - g) menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.

c. Sasaran Strategis “Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- 1) meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I) melalui Strategi adalah mengembangkan TMC yang terintegrasi sampai ke Polres-Polres;
- 2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan *Trend* fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui Strategi adalah melaksanakan program *Road Safety/Safety Ridding*.
- 3) membangun budaya tertib lalu lintas melalui Strategi sebagai berikut :

a) melaksanakan

- a) melaksanakan edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;
 - b) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;
 - c) melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Sasaran Strategis “Terbangunnya Kerjasama Lintas Sektoral dalam rangka Sinergi Polisional” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- Mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan lembaga serta kerjasama dengan luar negeri melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kerja sama terkait pelaksanaan Tupoksi Polda Metro Jaya;
 - b) Meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum.
- e. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengungkapan dan Penyelesaian Tindak Pidana” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) peningkatan kemampuan penyidik;
 - b) mengajukan pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;
 - c) meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian public;
 - d) meningkatkan kemampuan Polda Metro Jaya dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerjasama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - e) meningkatkan kapabilitas Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan *Stakeholder* lainnya; dan
 - f) mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah.
 - 2) membangun kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah melalui Strategi sebagai berikut :

- a) mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres;
 - b) meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;
 - c) mengajukan peningkatan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.
- f. Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- 1) optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program *Quick Wins*;
 - b) memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan public;
 - c) membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara :
 - (1) penggelaran Satpas *Online*;
 - (2) penggelaran sistem STNK *Online*;
 - (3) penggelaran sistem BPKB *Online*.
 - e) membangun sistem pelayanan publik secara *Online* dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api nonorganik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; dan
 - f) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh *Stakeholder* terkait dan masyarakat.
 - 2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) peningkatan

- a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Metro Jaya dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;
 - b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *Stakeholders* dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media *Online* dan media sosial;
 - c) membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap warga negara untuk mewujudkan rasa aman masyarakat melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
 - b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;
 - c) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa.
- 4) Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilu/ Pilkada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan serta sarana prasarana;
 - b) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
 - c) menyusun rencana kontinjensi.
- g. Sasaran Strategis "Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern" dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum melalui Strategi sebagai berikut :

a) memenuhi

- a) memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri yang modern melalui : Peningkatkan pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan; Peningkatan profesionalisme Polri dalam mengantisipasi konflik komunal, unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa serta kejahatan yang meresahkan masyarakat; Penguatan penanganan separatisme, terorisme, Narkoba, korupsi, kejahatan siber dan kebutuhan penggantian Almatsus yang tidak layak; Pembangunan teknologi kepolisian dan sistem informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi; Pengungkapan penanganan kasus tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan; Peningkatan pelayanan peralatan kesehatan; Peningkatan deteksi dan pencegahan gangguan Kamtibmas; dan Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Polri melalui pemenuhan peralatan dan fasilitas;
 - b) memenuhan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;
 - c) optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - d) membangun fasilitas kekuatan cadangan (*Stand by Force*) tingkat Polda Metro Jaya; dan
 - e) melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan.
- h. Sasaran Strategis “Terbangunnya Postur Polri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) rekrutmen personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan *Minimal Zero Growth* melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;
 - b) mempedomani kebijakan *Minimal Zero Growth* dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polda Metro Jaya dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;
 - c) masionalisasi dan realokasi personel Polda Metro Jaya tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; dan

d) menyusun

- d) menyusun database postur Polda Metro Jaya sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan *Minimal Zero Growth* Polri.
- 2) percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Metro Jaya melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
 - b) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem *Computer Assisted Test*.
 - 3) meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) menerapkan kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
 - b) mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri;
 - c) melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polda Metro Jaya, melalui penunjukan *Role Model*, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri; dan
 - d) mengajukan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi.
 - 4) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan structural;
 - b) menyeleksi dan menunjuk *Assessor* pada setiap fungsi teknis kepolisian.

5) mewujudkan

- 5) mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel guna soliditas internal Polri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;
 - b) mempercepat Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan *Reward and Punishment*;
 - c) meningkatkan integritas anggota Polda Metro Jaya dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polda Metro Jaya.
- 6) melanjutkan pembangunan standar pelayanan publik pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) menyusun kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara *Bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda Metro Jaya;
 - b) menyusun struktur organisasi dan tata kerja Polda Metro Jaya yang tepat ukuran (*Right Size*) dan tepat masa berlakunya (*Right Period*); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan sekitarnya serta tantangan tugas;
 - c) menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;
 - d) menyusun Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja.
- 7) mengembangkan hukum kepolisian sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya;
 - b) memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polda Metro Jaya;
 - c) meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

- 8) peningkatan kesejahteraan personel Polda Metro Jaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;
 - b) meningkatkan fasilitas kesehatan Polda Metro Jaya;
 - c) menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap; dan
 - d) memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.
- 9) mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Strategi sebagai berikut:
 - a) membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;
 - b) mengefektifkan pelaksanaan Wasrik Rutin, Wasrik Khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;
 - c) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;
 - d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Metro Jaya melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; dan
 - e) memperbaiki sistem komplain masyarakat secara *Online*.
- i. Sasaran Strategis “Tergelarnya kekuatan Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya di Kepulauan Seribu sebagai poros maritim” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
 - 1) penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi Polda Metro Jaya melalui Strategi adalah melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polda Metro Jaya;
 - 2) peningkatan pengamanan perbatasan melalui penggelaran personel dan pos-pos dalam rangka mendukung poros maritim melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan

- a) meningkatkan kemampuan Polda Metro Jaya untuk mengamankan wilayah perairan pada poros maritime;
- b) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemerintah Daerah;
- c) mengajukan penambahan kapal tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri; dan
- d) meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah pantai dan Polsek wilayah sungai.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Metro Jakarta Selatan.

a. Sasaran Strategis “Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- 1) memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polres Metro Jakarta Selatan yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat;
 - b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
 - c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.
- 2) pemantapan fungsi pencegahan terhadap 4 jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi melalui Strategi meningkatkan kegiatan *Pre-emptif* dan *Preventif* dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir gangguan Kamtibmas.

b. Sasaran Strategis “Tergelarnya Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Gejala Sosial Masyarakat” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- 1) melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas melalui Strategi sebagai berikut :

a) menguatkan

- a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu kelurahan;
 - b) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
 - c) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan *Pre-emptif* dan *Preventif*;
 - d) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;
 - e) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas;
 - f) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara; dan
 - g) menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.
- c. Sasaran Strategis “Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- 1) meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I) melalui Strategi adalah mengembangkan TMC yang terintegrasi sampai ke Polres-Polres;
 - 2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan *Trend* fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui Strategi adalah melaksanakan program *Road Safety/Safety Ridding*.
 - 3) membangun budaya tertib lalu lintas melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) melaksanakan edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;
 - b) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;
 - c) melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengungkapan dan Penyelesaian Tindak Pidana” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) peningkatan kemampuan penyidik;
 - b) mengajukan pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;
 - c) meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian public;
 - d) meningkatkan kemampuan Polda Metro Jaya dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerjasama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - e) meningkatkan kapabilitas Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan *Stakeholder* lainnya; dan
 - f) mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah.

- 2) membangun kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres;
 - b) meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;
 - c) mengajukan peningkatan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.

- e. Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
 - 1) optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program *Quick Wins*;
 - b) memenuhi

- b) memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik;
 - c) membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) membangun sistem pelayanan publik secara *Online* dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api nonorganik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; dan
 - e) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh *Stakeholder* terkait dan masyarakat.
- 2) penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres Metro Jakarta Selatan dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;
 - b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *Stakeholders* dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media *Online* dan media sosial;
 - c) membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel.
- 3) mengoptimalkan pengelolaan keamanan terhadap segenap warga negara untuk mewujudkan rasa aman masyarakat melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
 - b) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa.
- 4) mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilu/pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan

- a) meningkatkan kemampuan personel Polres Metro Jakarta Selatan dan satuan serta sarana prasarana;
 - b) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
 - c) menyusun rencana kontinjensi.
- f. Sasaran Strategis “Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres Metro Jakarta Selatan dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) mengusulkan pemenuhan kebutuhan minimal alat materil khusus (Almatsus) Polres Metro Jakarta Selatan yang modern melalui : Peningkatan pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan; Peningkatan profesionalisme Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengantisipasi konflik komunal, unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa serta kejahatan yang meresahkan masyarakat; Penguatan penanganan separatisme, terorisme, Narkoba, korupsi, kejahatan siber dan kebutuhan penggantian Almatsus yang tidak layak; Pembangunan teknologi kepolisian dan sistem informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi; Pengungkapan penanganan kasus tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan; Peningkatan pelayanan peralatan kesehatan; Peningkatan deteksi dan pencegahan gangguan Kamtibmas; dan Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Polres Metro Jakarta Selatan melalui pemenuhan peralatan dan fasilitas;
 - b) memenuhi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polres Metro Jakarta Selatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;
 - c) optimalisasi pengelolaan aset Polres Metro Jakarta Selatan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - d) melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek dan Polsubsektor.

- g. Sasaran Strategis “Terbangunnya Postur Polres Metro Jakarta Selatan yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) rekrutmen personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan *Minimal Zero Growth* melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;
 - b) mempedomani kebijakan *Minimal Zero Growth* dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polres Metro Jakarta Selatan dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;
 - c) masionalisasi dan realokasi personel Polres Metro Jakarta Selatan tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; dan
 - d) menyusun database postur Polres Metro Jakarta Selatan sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan *Minimal Zero Growth* Polres Metro Jakarta Selatan.
 - 2) percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polres Metro Jakarta Selatan melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres Metro Jakarta Selatan melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
 - b) mendukung penyelenggaraan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem *Computer Assisted Test*.
 - 3) meningkatkan profesionalisme anggota Polres Metro Jakarta Selatan melalui pendidikan dan pelatihan melalui Strategi sebagai berikut :
 - a) mendukung penerapan kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
 - b) mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan

- profesionalisme Polri;
- c) melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polres Metro Jakarta Selatan, melalui penunjukan *Role Model*, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri; dan
 - d) mendukung pengajuan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi.
- 4) mendukung sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian melalui Strategi sebagai berikut :
- a) mengikutsertakan sertifikasi personel Polres Metro Jakarta Selatan yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan structural;
 - b) mengikutsertakan personel untuk seleksi *Assessor* pada setiap fungsi teknis kepolisian.
- 5) mewujudkan tata kelola organisasi Polres Metro Jakarta Selatan yang bersih, transparan dan akuntabel guna soliditas internal Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Metro Jakarta Selatan melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;
 - b) mempercepat Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan *Reward and Punishment*;
 - c) meningkatkan integritas anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polres Metro Jakarta Selatan.
- 6) melanjutkan pembangunan standar pelayanan publik pada tingkat Polsek dan Polres dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan melalui Strategi sebagai berikut :
- a) menyusun kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara *Bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres;
 - b) menyusun

- b) menyusun struktur organisasi dan tata kerja Polres Metro Jakarta Selatan yang tepat ukuran (*Right Size*) dan tepat masa berlakunya (*Right Period*); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan sekitarnya serta tantangan tugas;
 - c) menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;
 - d) menyusun Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan analisa beban kerja.
- 7) mengembangkan hukum kepolisian sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional melalui Strategi memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres Metro Jakarta Selatan;
- 8) peningkatan kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme melalui Strategi sebagai berikut :
- a) meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polres Metro Jakarta Selatan melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;
 - b) meningkatkan fasilitas kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan;
 - c) mengusulkan pembangunan perumahan dinas bagi pegawai Polres Metro Jakarta Selatan secara bertahap; dan
 - d) mengikutsertakan personel untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan kepada pegawai Polres Metro Jakarta Selatan yang akan memasuki masa pensiun.
- 9) mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Strategi sebagai berikut:
- a) membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;
 - b) mengefektifkan pelaksanaan Wasrik Rutin, Wasrik Khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;
 - c) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;

d) meningkatkan

- d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Metro Jakarta Selatan melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; dan
 - e) memperbaiki sistem komplain masyarakat secara *Online*.
- h. Sasaran Strategis “Tergelarnya kekuatan Polri di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan” dicapai dengan Arah Kebijakan penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi Polres Metro Jakarta Selatan melalui Strategi adalah melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan;

4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Polres Metro Jakarta Selatan selalu mengikuti dan taat dengan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Aturan atau regulasi pada Polres Metro Jakarta Selatan ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Renstra merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Selatan selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Metro Jakarta Selatan berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan yang bersifat mengikat kepada personel Polri maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang telah dan direncanakan akan dibuat Polri dalam kurun waktu Tahun 2015-2019. Kerangka regulasi Renstra Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

KERANGKA

KERANGKA REGULASI

NO	SASARAN STRATEGIS	REGULASI TERKAIT		K E T
		YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senpi dan Handak 2. Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga 3. Perkap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil 4. Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang system dan manajemen operasional 5. Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor : Mak/05/IX/2017, tentang penyampaian pendapat dimuka umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang Perizinan dan Kegiatan Masyarakat 2. Regulasi sistem keamanan jalur bawah tanah transportasi masal terintegrasi termasuk keamanan stasiun MRT/LRT 	
2.	Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan 2. Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah 3. PP 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Korwa Bin Polsus, PPNS dan Bentuk-bentuk PAM Swakarsa 4. Perkap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bimtek Polsus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan 2. Pedoman Penilaian Penerapan Sistem manajemen Swakarsa berdasarkan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 3. Pedoman Pelatihan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa organisasi, perusahaan dan atau instansi/Lembaga pemerintah 4. SOP tentang Operasi Bina Waspada 5. SOP tentang Ops Bina Taruna 6. SOP tentang Turjawali Polsus 7. SOP Penyimpanan, Pemeliharaan dan penggunaan Senpi bagi Polsus 	
3.	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi 2. PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 3. Perkap Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang Penandaan SIM Pelanggar Lalu lintas 2. Peraturan tentang Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dengan <i>Electronic Law Enforcement</i> (EtLE) 3. Perkap tentang Pengaturan, Penjagaan dan Patroli (Turjali) lalu lintas 4. Peraturan tentang Pengawasan lalu lintas 5. Peraturan tentang Lampu Isyarat dan Sirine 	

1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana 2. Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri 3. Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri 4. Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri 5. Perkap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS 6. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan revisi Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana 2. Usulan revisi Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri 3. Usulan revisi Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di lingkungan Polri 4. Usulan revisi Perkap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS 5. Usulan revisi Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 6. Peraturan tentang Standar Kompetensi Penyidik Polri 7. Peraturan tentang Mekanisme Pengangkatan Penyidik dan Penerbitan Keputusan Penyidik 8. Peraturan tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana 	
5.	Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau korban Tindak Pidana 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri 2. Usulan revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana 3. Peraturan tentang Layanan Polisi 110 4. Peraturan tentang Pengamanan VIP dan Capres/Cawapres 5. Peraturan tentang Pengamanan Kepariwisataaan 6. Peraturan tentang pengamanan Kawasan Tertentu 	

1	2	3	4	5
			7. Peraturan tentang Tata cara Penanganan Pengaduan 8. Peraturan tentang Penyelesaian Sengketa Informasi 9. Peraturan tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Media Massa oleh Polri 10. Perkap tentang pelayanan SKCK	
6.	Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern	1. Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus 2. Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 35 Tahun 2011 dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Peraturan tentang Tata cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) 2. Peraturan tentang Tata cara Pengelolaan barang Persediaan 3. Peraturan tentang Pembinaan Materil Polri 4. Peraturan tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standarisasi Materil Logistik 5. Peraturan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi 6. Peraturan tentang Penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio 7. Peraturan tentang Penggunaan dan Alokasi <i>Internet Protokol (IP) Address</i>	

5. Kerangka Kelembagaan.

Kerangka kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup Pejabat Polri dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polri di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*), dan sikap (*Attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Penguatan kerangka kelembagaan ditandai dengan : a. tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan inefisiensi belanja operasional; b. tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*Well-Connected Governance System*); c. profesionalisme, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel; b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern; d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Kerangka kelembagaan Polres Metro Jakarta Selatan sebagai berikut :

KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	KELEMBAGAAN TERKAIT YANG SUDAH ADA	KERANGKA KELEMBAGAAN	K E T
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	1. Sat Intelkam 2. Sat Binmas 3. SatSabhara 4. Polsek-Polsek	1. Penguatan fungsi intelejen 2. Penguatan koordinasi intelejen	
2.	Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat	1. Sat Binmas 2. Polsek-Polsek	1. Penguatan Unit Binmas Polsek 2. Penguatan fungsi <i>Preemtif</i> pada tingkat Polsek dengan penggelaran 1 Anggota Bhabinkamtibmas 1 desa/kelurahan 3. Penguatan strategi Polmas tingkat Polres dan Polsek	

3. Meningkatnya

1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	1. Satlantas 2. Polsek-Polsek	1. Penguatan fungsi pencegahan dan rekayasa lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek 2. Penguatan fungsi penegakan hukum di bidang lalu lintas sampai tingkat Polsek	
4.	Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana	1. Satreskrim 2. Satresnarkoba 3. Polsek-Polsek	1. Penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tingkat Polsek 2. Penguatan fungsi pengawasan penyidikan pada tingkat Polres 3. Penguatan koordinasi dengan <i>Criminal Justice System</i> , KPK, PPATK, BNN, BNPT, Bakamla, Bea Cukai, PPNS lainnya	
5.	Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian	1. Siwas 2. Sat Lantas 3. Sat Intelkam 4. Satreskrim 5. Satresnarkoba 6. Satsabhara 7. SPKT 8. Subbag Humas 9. Polsek-Polsek	1. Penguatan penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan 2. Penguatan budaya pelayanan pada SDM tingkat Polres dan Polsek 3. Penguatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik 4. Terbangunnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	
6.	Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres Metro Jakarta Selatan dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern	1. Subbag Sarpras 2. Bag Rena 3. Sie TI Pol 4. Subbag Humas 5. Peningkatan tipe Polsek	1. paur Multimedia, Subbag humas 2. peningkatan tipe Polsek 3. Pos Polisi stasiun angkutan masal bawah tanah/MRT 4. Penguatan HTCK Polres dengan instansi terkait	
7.	Terbangunnya Postur Polres Metro Jakarta Selatan yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya	1. Bag Sumda 2. Bagren	1. Pembentukan Assesment Center 2. Revisi DSPP sesuai ABK pada SOTK Polres dan Polsek	
8.	Tergelarnya kekuatan Polri di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	3. Bag Sumda 4. Sat Sabhara 5. Sat Binmas 6. Polsek-polsek	1. Penguatan SDM pada Polres dan Polsek	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polres Metro Jakarta Selatan maka disusunlah Target Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi) yang ingin dicapai.

Penyusunan Target Kinerja dari Indikator Kinerja Utama memudahkan dilaksanakannya kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 dalam rangka membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Wilayah Jakarta Selatan atas penggunaan anggaran yang dikelola Polres Metro Jakarta Selatan (*Proving*) serta upaya peningkatan kualitas dengan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (*Improving*).

Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian Indikator Kinerja yang membandingkan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Target Kinerja Polres Metro Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					K E T
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	1. Persentase laporan intelijen yang didistribusikan ke Pimpinan	-	-	-	50%	55%	
		2. Persentase laporan intelijen yang didistribusikan ke lintas sektoral	-	-	-	20%	25%	
		3. Persentase penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas	6%	7%	8%	9%	10%	

2. Tergelarnya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat	1. Persentase Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan secara proporsional	-	-	-	100%	100%	
		2. Jumlah <i>Problem Solving</i> oleh Bhabinkamtibmas	-	-	-	1.560	3.120	
3.	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	1. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas (6 jenis) yang berpotensi kecelakaan	-	-	-	17%	18%	
		2. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh R2 / jenis R2	-	-	-	55%	60%	
		3. Persentase peningkatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan	-	-	-	62%	67%	
4.	Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana	1. Persentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	-	-	-	51%	53%	
		2. Persentase penyampaian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang tepat waktu	-	-	-	70%	75%	
		3. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/ <i>Arbitrase/ Mediasi/Restorative Justice</i> (SP3)	-	-	-	30%	33%	
5.	Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian	1. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan	B	B	B	B	B	
		2. Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan	-	-	-	33%	35%	
6.	Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres Metro Jakarta Selatan dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan kepolisian dan teknologi informasi kepolisian modern	Jumlah penambahan pembangunan fasilitas pelayanan publik (Polres, Polsek, Polsubsektor)	-	-	-	3	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Terbangunnya Postur Polri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya	Persentase personel Polres Metro Jakarta Selatan yang menduduki jabatan eselon III ke atas berdasarkan hasil <i>Assesment</i>	-	-	-	10%	15%	

2. Kerangka Pendanaan

Dalam mewujudkan sasaran isu strategis nasional bidang pertahanan dan keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan peningkatan profesional Polres Metro Jakarta Selatan. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari rupiah murni, juga dipenuhi dari PNBPN. Kerangka Pendanaan Polres Metro Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polres Metro Jakarta Selatan yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas Meningkatkan kegiatan <i>Pre-emptif</i> dan <i>Preventif</i> dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir gangguan Kamtibmas 	RM PNBP	<ol style="list-style-type: none"> Sat Intelkam Sat Binmas Sat Sabhara

2. Tergelarnya

1	2	3	4	5
2.	Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan 2. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan 3. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan <i>Preemptif</i> dan <i>Preventif</i> 4. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas 6. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara 7. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat. 	RM PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sat Binmas 2. Sat Sabhara 3. Polsek
3.	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan TMC yang terintegrasi dengan Polda 2. Melaksanakan program <i>Road Safety/Safety Ridding</i> 3. Melaksanakan edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan 4. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis 5. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas. 	RM PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SatLantas
4.	Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan, latihan dan sertifikasi 2. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik 3. Meningkatkan kemampuan Polres Metro Jakarta Selatan dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba 4. Meningkatkan kapabilitas Polres Metro Jakarta Selatan dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan <i>Stakeholder</i> lainnya 5. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah 6. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres 	RM PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satreskrim 2. Satresnarkoba

1	2	3	4	5
		7. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah 8. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah		
5.	Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>Quick Wins</i> 2. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik 3. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 4. Meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara : (a) penggelaran <i>Satpas Online</i> ; (b) penggelaran sistem <i>STNK Online</i> ; (c) penggelaran sistem <i>BPKB Online</i> . 5. Membangun sistem pelayanan publik secara <i>Online</i> dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak 6. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh <i>Stakeholder</i> terkait dan masyarakat 7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres Metro Jakarta Selatan dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal 8. Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan <i>Stakeholders</i> dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media <i>Online</i> dan media sosial 9. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel 10. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan 11. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional 12. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa 13. Meningkatkan kemampuan personel Polres Metro Jakarta Selatan 14. Mengajukan rencana kebutuhan dan alokasi anggaran 15. Mengajukan rencana kontinjensi.	RM PNBP	1. Bagren 2. Subbag Sarpras 3. Si TI Pol 4. Subbag Humas 5. SatIntelkam 6. Sat Lantas 7. Sat Sabhara 8. Sat Binmas

1	2	3	4	5
6.	Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas. 2. Optimalisasi pengelolaan aset Polres Metro Jakarta Selatan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum. 3. Mengajukan pembangunan fasilitas kekuatan cadangan (<i>Stand by Force</i>) tingkat Polres Metro Jakarta Selatan. 4. Mengajukan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan. 	RM PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagren 2. Subbag Sarpras 3. Si TI Pol
7.	Terbangunnya Postur Polri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas 2. Mepedomani kebijakan <i>Minimal Zero Growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polres Metro Jakarta Selatan dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender 3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan 4. Menyusun database postur Polres Metro Jakarta Selatan sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan <i>Minimal Zero Growth</i> Polri 5. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres Metro Jakarta Selatan melalui teknologi informasi berdasarkan <i>Merit System</i> dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi 6. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> 7. Menerapkan kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan 8. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polres Metro Jakarta Selatan 9. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan <i>Role Model</i>, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri 	RM PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siwas 2. Bag sumda 3. Bagren 4. Subbag Sarpras 5. Si Propam 6. Ur Dokes 7. Sat Binmas

1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Mengusulkan sertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural 11. Menyeleksi dan menunjuk <i>Assessor</i> pada setiap fungsi teknis kepolisian 12. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres 13. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>Reward and Punishment</i> 14. Meningkatkan integritas anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri 15. Menyusun kebutuhan minimal pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>Bottom Up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres Metro Jakarta Selatan 16. Menyusun struktur organisasi dan tata kerja Polres Metro Jakarta Selatan yang tepat ukuran (<i>Right Size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>Right Period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas 17. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya 18. Menyusun Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja 19. Melakukan evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri 20. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres Metro Jakarta Selatan 21. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait 22. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan 23. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri 24. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap 25. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun 26. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi 27. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu 		

1	2	3	4	5
		28. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan 29. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Metro Jakarta Selatan melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri 30. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>Online</i> .		
8.	Tergelarnya kekuatan Polri di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan	1. Melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan, Pemerintah Daerah	RM PNBP	1. Bagsumda 2. Bagren 3. Subbag Sarpras 4. Sat Binmas

BAB V

BAB V

PENUTUP

1. Kaedah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi dan distribusi

- a. Autentifikasi Renstra Polres Metro Jakarta Selatan merupakan jabaran dari Renstra Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan sebagai pimpinan Kepolisian Resort sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Sاتفung dan Polsek untuk dipedomani guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Oktober 2017

KEPALA KEPOLISIAN POLRES METRO JAKSEL


IWAN KURNIAWAN, S.IK., M.SI.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 70040683